

# Negara dan Sindrom Otak Kiri

**Hery Santoso**

Pegiat sosial Java Learning Center (JAVLEC)

✉ her.sant@yahoo.co.id

**SARAN PENULISAN PUSTAKA:** SANTOSO, H. 2017. “*Negara dan Sindrom Otak Kiri.*” Ulasan buku *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed* karya James C. Scott. *Wacana* 36: 199–211.

© 2017 PENULIS. Diterbitkan oleh INSISTPress (anggota Indonesian Society for Social Transformation [INSIST]). Tulisan ini disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0).



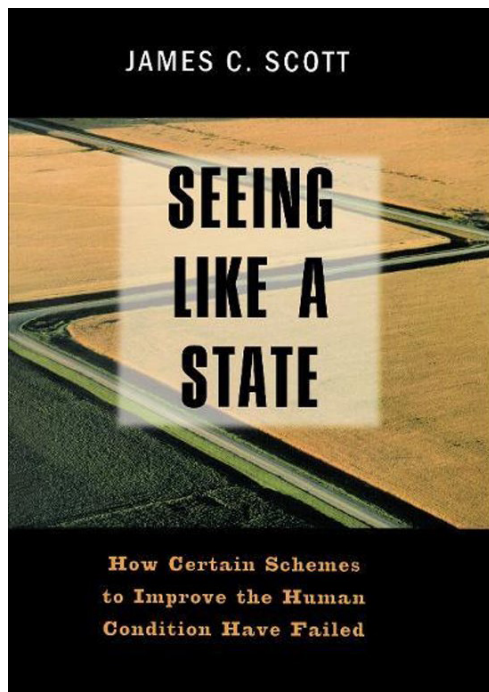
**JUDUL**  
*Seeing Like a State:  
How Certain Schemes  
to Improve the Human  
Condition Have Failed*

**PENULIS**  
James C. Scott

**WAKTU TERBIT**  
Pertama, 1998

**JUMLAH HALAMAN**  
xiv + 445 Halaman

**PENERBIT**  
Yale University Press



Kita mungkin masih ingat, pada suatu masa, pemerintah Orde Baru merasa perlu mengatur, jika bukan mengendalikan, identitas kota. Atas nama pembangunan, negara mengesampingkan kenyataan historis dan kultural bahwa identitas kota sudah ada sejak lama, tumbuh seiring dengan denyut kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik warga.

Sudah lama orang tahu bahwa Pekalongan adalah Kota Batik karena memang secara turun-temurun warganya berhasil memproduksi batik berkualitas. Sudah lama pula kita memaklumi bahwa Yogyakarta dikenal sebagai Kota Pelajar karena memang banyak orang dari luar Yogyakarta yang tertarik untuk belajar di kota ini, baik karena atmosfer kotanya yang dipandang kondusif bagi kegiatan pembelajaran maupun karena kualitas pendidikannya yang menjanjikan. Sejak dulu anak-anak bahkan mengetahui bahwa Surabaya adalah Kota Pahlawan karena di sana pernah terjadi peristiwa heroik ketika bangsa Indonesia terlibat pertempuran sengit melawan pemerintah kolonial Belanda. Kita pun sudah lama mengenal Temanggung sebagai sentra penghasil tembakau berkualitas di Jawa, Martapura sebagai kota penghasil intan, Padang terkenal dengan para perantaunya, dan sebagainya.

Namun, dalam pandangan negara Orde Baru, identitas kultural semacam itu dipandang tidak cukup, bahkan juga tidak penting, terutama kalau dikaitkan dengan relasi kekuasaan yang terpusat. Karena itu, negara merasa perlu mengatur pembentukan identitas baru yang lebih bersifat struktural. Orde yang secara politik cenderung “ultrakanan” itu bagai mengidap sindrom otak kiri: terobsesi pada pola-pola baku, sehingga kompleksitas perlu disederhanakan dan keragaman perlu diseragamkan.

Itulah mengapa, pada 1980-an, kota-kota di Indonesia menjadi kenes, terkesan seperti artis yang tiba-tiba sibuk merekayasa diri dengan sebutan-sebutan baru. Berbagai akronim diciptakan dan dipaksakan untuk menjadi semboyan sekaligus menandai identitas, sesuatu yang terkadang justru mengundang senyum. Kita mengenal Yogyakarta *Berhati Nyaman* (Bersih, Sehat, Indah, dan Nyaman), Temanggung *Bersenyum* (Bersih, Sehat, dan Nyaman untuk Umum), Sidoarjo *Permai Bersih Hatinya* (Pertanian Maju, Andalan Industri, Bersih, Rapi, Serasi, Hijau, Sehat, Indah, dan Nyaman), Jakarta *BMW* (Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa), dan sebagainya.

Negara versi Orde Baru memang sudah selesai. Tetapi, hasrat negara untuk melakukan penertiban, pengendalian, dan pengaturan tidak pernah selesai. Bahkan, kalau menengok ke belakang, hasrat semacam itu adalah tradisi tua yang berkembang seiring dengan lahirnya gagasan negara-bangsa. Jauh hari sebelum Indonesia merdeka, pemerintah kolonial sudah terlebih dahulu menggalakkan berbagai proyek pengendalian dan pengaturan, mulai dari mentransformasikan hutan di Jawa menjadi perkebunan kayu sejenis, mengorganisir ruang kelola masyarakat dengan penerapan asas *domein verklaring* (asas yang menyatakan bahwa setiap tanah yang tidak dapat dibuktikan oleh seseorang bahwa itu miliknya maka tanah itu menjadi tanah milik negara), mengendalikan sebaran populasi dengan memperkenalkan transmigrasi, merelokasi masyarakat pedalaman yang dianggap sebagai suku terasing, dan berusaha keras mengubah sistem perladangan berpindah menjadi pertanian menetap.

Di tempat-tempat lain di dunia, hal-hal semacam itu menjadi pekerjaan rutin negara sepanjang zaman. Karena itu, tidak berlebihan apabila kita mengatakan bahwa kehadiran negara ternyata tidak saja identik dengan hadirnya sosok Leviathan, jawara adidaya yang dalam bayangan Thomas Hobbes (1998) akan melakukan kontrak sosial dengan segenap warga. Kehadiran negara tampaknya juga ditandai dengan lahirnya Sisifus, tokoh dalam mitologi Yunani yang tidak pernah jera melakukan pekerjaan yang sama sepanjang waktu meski terkadang tidak efektif.

## Rekayasa Sosial dan Penyederhanaan

Melalui *Seeing Like a State*, James C. Scott berusaha menyingkap labirin cara pandang negara terhadap segenap hal; tidak saja terhadap cara hidup warga, tetapi juga terhadap cara tumbuh hutan dan pertanian, bentuk lanskap desa dan kota, tata letak jalan, distribusi tenaga kerja, bahkan terhadap bagaimana sebaiknya orangtua memberi nama anak-anak mereka. Labirin itu diciptakan terutama untuk menopang berbagai kepentingan, mulai dari pengumpulan pajak, pengendalian politik warga, kemudahan pengawasan, hingga pelacakan para pembangkang dan pelanggar hukum. Semua itu bagian dari proyek abadi negara yang disebut Scott sebagai rekayasa sosial (*social engineering*).

Ia mencatat bahwa selama ini negara berusaha menggabungkan empat elemen dalam memuluskan proyek-proyek rekayasa sosial. Keempat elemen berikut ini adalah elemen-elemen yang memungkinkan proses rekayasa sosial oleh negara bisa dijalankan sepanjang waktu, sesuatu yang—meminjam cara pandang Gramsci (1971)—dapat dikatakan sebagai hegemoni: dominasi peran negara dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan warga.

Elemen *pertama* adalah tertib administrasi sosial dan sumberdaya alam. Dengan cara ini, negara melakukan penyederhanaan-penyederhanaan dan menyingkirkan kompleksitas, lokalitas, dan minoritas, semata-mata untuk menciptakan keteraturan kehidupan warga. Elemen *kedua* adalah penerapan ideologi modernitas tingkat lanjut (*high modernism*). Elemen ini menjadi semacam tulang punggung segenap tindakan negara untuk melakukan pengaturan dan pengendalian. Melalui elemen ini, Scott mencatat bahwa negara berusaha keras mentransformasikan kekuatan sains dan teknologi dalam rangka menggenjot produktivitas. Elemen *ketiga* adalah pengendalian kekuasaan oleh negara (*authoritarian state*). Elemen ini sesungguhnya baru bisa berjalan efektif ketika kedua elemen pertama berhasil dicapai. Dari elemen ketiga inilah kita mengenal perang, revolusi, perjuangan merebut kemerdekaan nasional, bahkan depresi yang melanda negara-bangsa. Elemen *keempat* sangat terkait dengan elemen ketiga, yaitu ketidakberdayaan masyarakat sipil menghadapi segenap rencana yang dirancang negara. Perang, revolusi, dan depresi memiliki kaitan yang sangat erat dengan keberadaan elemen keempat.

Di muka, kita sudah mencoba untuk mengingat kembali bagaimana salah satu proyek rekayasa sosial oleh negara Orde Baru berusaha menciptakan akronim-akronim ajaib untuk mengendalikan identitas kota. Kalau mau ditambah, kita bisa memasukkan bagaimana Orde Baru meluncurkan proyek “Jawanisasi”, yakni dengan melakukan penyeragaman organisasi sosial di tingkat tapak. Organisasi sosial lokal seperti *nagari* di Sumatra Barat, *gampong* di Aceh, atau *banjar*

di Bali dipandang tidak efektif dan digantikan dengan *desa*, sebuah model yang sangat bias organisasi sosial di Jawa. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Orde Baru meletakkan desa sebagai mesin birokrasi negara, yang sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan supradesa.

Namun, sejak abad XV, sebagaimana dicatat Scott dalam buku ini, negara-negara Barat sibuk membuat penyeragaman aturan penamaan bagi setiap bayi yang lahir. Tujuannya sama: meningkatkan efektivitas pengendalian. Demi menciptakan ketertiban—dan tentu saja dalam rangka memudahkan pengendalian, setiap nama yang disandang warga harus memenuhi standar baku penamaan, yakni terdiri atas nama pemberian (*given name*) dan nama keluarga (*family name* atau *surname*).

Boleh saja William Shakespeare, pujangga kondang Inggris, mengatakan: “apalah arti sebuah nama”. Tetapi, bagi Pemerintah Inggris, nama adalah identitas yang dipandang sangat penting. Menurut Scott, mekanisme pencatatan, pelacakan, dan pengendalian bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya melalui nama. Dengan aturan penamaan baku, negara akan dengan cepat mengidentifikasi warga: siapa yang melakukan pembangkangan, siapa yang tidak membayar pajak, siapa yang melakukan migrasi, siapa yang menjadi tuan tanah, siapa dari garis keturunan mana, siapa menurunkan siapa, dan sebagainya. Pendek kata, standarisasi penamaan di Barat adalah bagian dari politik pengaturan dan pengendalian untuk menopang kekuasaan negara.

Nama-nama yang sebelumnya menganut berbagai pola—kadang mengacu pada daerah kelahiran (misalnya, Rene van Basten atau “Rene dari Basten”), seringkali mengacu pada pekerjaan (misalnya, Don Butler atau “Don tukang jagal ternak”) atau siklus hidup (Allice ketika masih remaja dan Allison Wonderee ketika sudah dewasa atau Midi ketika masih anak-anak dan Rejo Sutopo ketika sudah berkeluarga)—dipandang membingungkan dan mengacaukan proses registrasi. Nama-nama semacam itu akan menunjuk pada banyak orang tanpa bisa dilacak akarnya.

Scott mengilustrasikan betapa seorang detektif dan *sheriff* akan putus asa ketika harus melacak sebuah nama seandainya ketentuan yang mengatur nama pemberian dan nama keluarga tidak dibakukan. Dalam situasi seperti ini pula kini tradisi orang Jawa mengubah nama kanak-kanak (biasanya singkat, misalnya Senawi) menjadi nama dewasa (misalnya, Sastro Darsono) tidak bisa lagi diterapkan dengan leluasa. Alasannya sama: mengacaukan cara pandang dan cara kerja negara yang terfokus pada pengaturan dan pengendalian.

Dalam pandangan Scott, negara sesungguhnya mengalami paranoia ketika berhadapan dengan hal-hal yang kompleks. Kompleksitas sistem penamaan saja dipandang perlu diatur dan dikendalikan,

apalagi ekosistem hutan alam yang cenderung rumit. Itulah mengapa, melalui Johann Gottlieb Beckmann, Prusia (Jerman kuno) merasa perlu mengembangkan teknik-teknik kehutanan yang disebut kehutanan akademik (*scientific forestry*), perangkat keilmuan yang perkembangannya ditopang oleh kampus-kampus di berbagai belahan dunia dan tentu saja didukung oleh kekuatan negara. Sampai hari ini, kehutanan akademik yang dirintis Beckmann sejak awal abad XVIII diwariskan secara konsisten dan turun-temurun dari satu generasi rimbawan ke generasi rimbawan berikutnya.

Para rimbawan barangkali tidak pernah menyadari bahwa pengelolaan hutan yang didasarkan atas kaidah-kaidah kehutanan akademik adalah suatu perwujudan tindakan politik. Tetapi, dari *Seeing Like a State* (Bab 1), kita tidak bisa memungkiri bahwa kehutanan akademik yang mulai dikembangkan di Prusia adalah proyek ekonomi politik negara. Kelahiran kehutanan akademik sebenarnya tak bisa dilepaskan dari perkembangan ide mengenai birokrasi negara terpusat, yang pada waktu itu menjadi semacam arus utama modernisme di Eropa. Apa yang dinamakan sebagai ilmu kehutanan modern (*new forestry science*) adalah cabang dari *cameral science*, disiplin ilmu yang berusaha mengembangkan pendekatan akademik (modern) terhadap pengelolaan kekayaan negara. Melalui disiplin itulah perencanaan dan penghitungan dilakukan dengan metode baru yang lebih sistematis dan akurat, sehingga memungkinkan terselenggaranya inventarisasi secara teratur dengan hasil yang lebih pasti, sesuai dengan apa yang diprediksikan.

Kehutanan akademik mentransformasikan segenap hal berdasarkan prinsip-prinsip itu, hingga pada akhirnya kompleksitas sistem yang membentuk hutan pun disederhanakan, disajikan dalam model matriks, dengan klaim bahwa itulah yang disebut hutan normal. Tentu saja kita bisa mengatakan bahwa gambaran hutan yang tersaji dalam model matriks semacam itu tidak lain adalah ringkasan kasar, abstraksi sederhana dari ekosistem hutan yang sebenarnya. Di sana hanya ada deretan angka yang berbunyi, kurang lebih, berapa kubik kayu komersial yang bisa dipanen dari satu areal hutan dengan luasan dan umur tertentu. Tak lebih dari itu. Tak ada hal-hal lain, misalnya komponen-komponen hutan yang realitasnya begitu kompleks dan beraneka ragam. Tak ada gambaran, taruhlah, bagaimana hutan mengemban peranan bagi segenap entitas yang ada di sekitarnya, termasuk masyarakat yang tinggal di dalam dan sekelilingnya. Bagi seorang rimbawan, untuk tidak mengatakan seorang praktisi kehutanan akademik, dengan tabel semacam itu di tangan, tentu tak akan banyak yang bisa dikerjakan, kecuali menghitung pertumbuhan dan kubikasi kayu yang bisa dipungut, tanpa harus mengurangi stok kayu

yang ada di dalam hutan. Langkah-langkah itu sering disebut sebagai prinsip kelestarian hasil, sebuah logika pokok, jika bukan ideologi, kehutanan akademik.

Kentalnya visi ekonomi dalam penyelenggaraan kehutanan tentu saja membawa konsekuensi pada berbagai penyempitan arti hutan. Hutan tidak lagi dipandang sebagai bagian dari ekosistem yang memuat berbagai komponen dan fungsi. Hutan tidak lagi dianggap sebagai ruang kehidupan bagi berbagai pihak. Hutan tidak lagi diletakkan sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat setempat. Hutan merupakan sumber kekayaan yang menjadi domain penguasa, harta yang perlu mereka jaga. Dalam cara pandang utilitarian semacam itu, keberadaan hutan praktis sama dengan kebun—jika bukan tambang—kayu, yang nilainya diukur dari berapa lembar papan yang bisa dihasilkan, berapa batang balok yang bisa diproduksi, dan berapa kubik kayu bakar yang bisa diperoleh.

Komponen-komponen lain, misalnya kayu-kayu tertentu yang tidak sesuai dengan kepentingan penguasa (yang dianggap sebagai kayu nonkomersial), semak belukar yang menjadi penutup lantai hutan, binatang-binatang bukan buruan, serta jamur dan berbagai macam organisme tanah yang menopang keberadaan ekosistem hutan, menjadi terabaikan, terbuang, dan pada tahap tertentu dianggap sebagai pengganggu. Masyarakat lokal yang memanfaatkan hutan sebagai arena pencaharian dan sumber pangan, baik melalui kegiatan perburuan perladangan maupun pengumpulan berbagai hasil hutan bukan kayu, menjadi tersisih. Aspek-aspek kultural dan sistem nilai lokal yang terkait dengan hutan, antara lain hukum adat dan peraturan desa, tidak mendapat tempat, jika bukan dinegasikan. Semua ini pada akhirnya membawa hutan pada realitas baru, yakni komoditas, bukan habitat bagi segenap makhluk hidup dan segala komponennya.

Kita bisa menangkap gambaran yang paling jelas pada berbagai ungkapan, terutama pada ungkapan dalam bahasa Inggris, yang digunakan untuk memaknai berbagai praktik penyelenggaraan kehutanan. Istilah *nature* (alam) yang merepresentasikan kompleksitas diganti menjadi *natural resources* (sumberdaya alam) yang hanya mengacu pada hal-hal tertentu yang bisa dimanfaatkan penguasa. Istilah *wood* (kayu) yang bernilai komersial mempunyai nama baru *timber* (kayu pertukangan). Tanaman yang bermanfaat disebut *crop* dan tanaman yang dianggap tidak bermanfaat disebut *weed*. Binatang yang cocok untuk perburuan bagi penguasa disebut *livestock*, sedangkan binatang yang mengganggu perburuan disebut *prey*. Kegiatan pertanian masyarakat di hutan disebut “perladangan liar” (atau *bibrikan* dalam konteks masyarakat Jawa), pengambilan kayu hutan disebut sebagai “pencurian”, pemanfaatan berbagai komponen

hutan untuk penghidupan disebut sebagai “perambahan”, dan berbagai peraturan lokal (adat) yang menyangkut hutan dan kehutanan dianggap bertentangan dengan hukum.

### **Potret Tindakan Generik**

*Seeing Like a State* pada akhirnya seperti menunjukkan kepada kita tentang tindakan-tindakan generik yang dilakukan negara selama ini, yakni simplifikasi, transformasi visi, dan rekayasa sosial. Secara ideologis boleh saja kapitalisme Amerika Serikat berseberang jalan dengan komunisme Rusia (hal. 193). Tetapi, secara generik, terutama dalam hal relasi produksi, tindakan-tindakan yang dilakukan kedua negara tersebut sesungguhnya berada dalam koridor yang sama, yakni berusaha keras untuk mengatur dan mengendalikan proses produksi, khususnya pangan, demi meneguhkan kekuasaan negara atas warga. Itulah mengapa koneksi sesama insinyur pertanian di antara kedua negara tersebut hampir tidak pernah terputus, bahkan di era Perang Dingin sekalipun. Melalui berbagai terbitan jurnal dan konferensi, para pakar pertanian dari kedua negara tersebut saling terhubung dan secara tidak langsung saling melengkapi keping-keping *puzzle* megaproyek pertanian mereka.

Boleh jadi dalam suasana seperti itulah W.S. Rendra, pada suatu kesempatan ketika menanggapi ketegangan-ketegangan yang sering muncul antara Indonesia dan Australia, berkomentar mengagetkan. Konon, katanya, antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia sebenarnya tidak ada ketegangan apa pun. Antara pers Australia dan pers Indonesia juga tidak ada masalah. Biasanya ketegangan justru terjadi antara Pemerintah Indonesia dan pers Australia atau antara pers Indonesia dan Pemerintah Australia. Dari sini kita bisa memahami bahwa negara, sebagai wali masyarakat (*trusteeship*), secara generik memiliki banyak kesamaan. Mereka sama-sama merasa perlu melakukan pengaturan dan penyederhanaan-penyederhanaan di berbagai kehidupan sosial warga. Tidak heran kalau tiap-tiap negara seperti memegang prinsip angkutan umum: sesama bus kota dilarang saling mendahului. Mengapa bisa demikian?

Jawaban itu ditampilkan secara bernas oleh Scott dalam *Seeing Like a State*. Sejak halaman pertama hingga terakhir, buku ini seperti tidak memberi jeda kepada pembaca. Secara konsisten Scott membombardir kita dengan argumentasi dan fenomena-fenomena global menyangkut tindakan-tindakan generik negara. Ia seperti hendak mengatakan bahwa negara, di mana saja dan kapan saja, selalu mengidap sindrom yang sama: terobsesi pada pengaturan dan pengendalian. Dalam pandangannya, tidak ada musuh abadi negara, kecuali kompleksitas,



lokalitas, dan minoritas. Sepanjang sejarah, hal-hal semacam itulah yang berurusan dengan ideologi *high modernism* negara.

Melalui ideologi ini, negara berusaha keras memanfaatkan sains dan teknologi untuk menyingkirkan kompleksitas, lokalitas, dan minoritas, semata-mata demi mempromosikan homogenitas dan menggenjot produktivitas. Apa yang dilakukan Vladimir Lenin di Rusia dengan praktik pertanian kolektifnya maupun Thomas Campbell dan J.P. Morgan di Montana (Amerika Serikat) dengan pertanian raksasanya sesungguhnya berada dalam logika yang sama (hal. 198). Mereka sama-sama menerapkan doktrin Frederick Taylor, peletak dasar model-model manajemen modern, yang lebih mengedepankan peran sains dan teknologi untuk segenap proyek rekayasa, tidak terkecuali dalam pertanian.

Di mata Taylor, pertanian modern tak ubahnya pabrik pangan dan serat. Itulah mengapa pengaturan dan pengendalian proses produksi adalah keniscayaan. Ia berusaha keras melakukan rasionalisasi terhadap tata letak bangunan, standarisasi penggunaan mesin dan alat, dan mempromosikan apa yang dinamakan sebagai mekanisasi pertanian. Model pertanian semacam itulah yang diadopsi negara sebagai sarana pengaturan dan pengendalian proses produksi, sebuah praktik pertanian yang—dalam perhitungan Scott—sembilan puluh persen didominasi oleh kerja mesin dan hanya sepuluh persen berupa kerja budidaya oleh manusia.

Dalam logika seperti itu pula Julius Nyerere di Tanzania yang sosialis dan Soeharto di Indonesia yang neofasis meluncurkan proyek relokasi dan desanisasi: negara berusaha mengatur model permukiman warga demi mempermudah pengawasan dan pengendalian, yang kemudian sering diartikulasikan sebagai pembangunan dan pemberdayaan. Sejauh ini kita memang tidak bisa menemukan angka pasti yang menyebutkan berapa jumlah warga yang berhasil direlokasi oleh Soeharto pada masanya. Tetapi, di Tanzania, Scott mencatat, selama kurang lebih tiga tahun (1973–1976), Nyerere berhasil merelokasi setidaknya lima juta orang. Mereka yang tinggal di gunung-gunung dan terpencar didorong untuk menempati hunian baru berupa desa-desa di dataran rendah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini merupakan capaian proyek rekayasa sosial yang luar biasa, mengingat Tanzania tergolong sebagai negara yang tidak sekuat Rusia ketika melakukan rekayasa pertanian kolektif.

Proyek relokasi itu tentu saja sarat dengan praktik kekerasan. Pada mulanya Nyerere memang menekankan bahwa megaprojek relokasi didasarkan atas prinsip kerelaan, tetapi pada akhirnya megaprojek itu dijalankan dengan mekanisme militer, trajektori yang juga ditempuh Soeharto dalam menjalankan proyek-proyek relokasinya.

Li (2007) dalam *The Will to Improve* dengan jelas menunjukkan betapa pemindahan masyarakat pegunungan di Sulawesi Tengah ke daerah-daerah yang lebih rendah diwarnai berbagai tekanan dari segenap aparat pemerintah, tidak terkecuali aparat militer.

Sampai di sini, kita bisa merasakan bagaimana *Seeing Like a State* mengajak kita untuk bertamasya ke dalam, jika bukan menelanjangi, labirin yang selama ini menjadi optik negara dalam memandang warga sekaligus menjalankan proyek kekuasaan. Sejak dari mekanisasi pertanian hingga desanisasi, negara terobsesi untuk menyaksikan keseragaman dan keteraturan. Dengan kata lain, melalui buku ini sebenarnya Scott sedang mengatakan bahwa negara, di mana pun dan kapan pun, ditakdirkan untuk mengidap sindrom *obsessive-compulsive disorder* (OCD), sebuah perilaku aneh yang tidak bisa berkompromi dengan keberagaman dan ketidakteraturan.

### **Penutup: *Metis?***

Adakah proyek-proyek ambisius negara yang disinggung di muka pada akhirnya membuahkan hasil seperti yang direncanakan? Dengan tegas Scott mencatat: alih-alih membuahkan hasil, di banyak kasus yang terjadi justru tragedi yang tidak terbayangkan. Pertanian kolektif di Rusia, proyek pertanian raksasa di Montana, desanisasi di Tanzania, dan pembangunan perkebunan kayu di Eropa, hampir semuanya mendatangkan segenap persoalan baru, mulai dari kesenjangan sosial yang makin melebar hingga kerusakan lingkungan yang terus meningkat.

Bagaimanapun para perencana pembangunan bukanlah “Tuhan”, demikian Scott beralasan, sebuah alasan yang saya kira justru bisa menjadi senjata makan tuan. Bisa ditambahkan pula, objek pengaturan dan pengendalian sendiri adalah sekumpulan manusia yang memiliki kehendak, bahkan bisa berpura-pura, untuk tidak mengatakan mengelabui. Karena itu, mengandaikan proyek-proyek rekayasa sosial yang dipromosikan oleh agen-agen negara sebagai lokomotif yang akan tetap berjalan pada relnya dari satu stasiun ke stasiun berikutnya adalah sesuatu yang naif. Dalam bahasa Fisher (2009), ini bukti bahwa sejarah tidak pernah bisa dibentuk oleh rancangan secanggih apa pun.

Kegagalan proyek pertanian Montana dan proyek pencetakan sawah satu juta hektare di Kalimantan Tengah adalah contoh bahwa doktrin Frederick Taylor tentang transformasi pertanian modern, yakni dari kegiatan budidaya tanaman menjadi fabrikasi pangan dan serat, tidak bisa sepenuhnya dioperasikan. Transformasi hutan menjadi perkebunan kayu sejenis sebagaimana diinisiasi Beckmann di Prusia juga

memicu munculnya persoalan-persoalan baru. Kerusakan lingkungan adalah salah satu isu yang muncul ke permukaan sejak proyek pembangunan perkebunan kayu dimulai. Belakangan Jack Westoby, ekonom yang bekerja untuk Food and Agriculture Organization (FAO), juga mencatat bahwa proyek kehutanan akademik yang dijalankan selama beberapa abad hanya memberi manfaat kepada sekelompok orang. Kata-katanya yang sangat terkenal: “Semakin banyak uang diinvestasikan untuk pembangunan industri kehutanan, semakin lebar kesenjangan sosial terjadi.” Itulah mengapa ia mempromosikan perhutanan sosial, praktik kehutanan yang diarahkan untuk menopang kehidupan orang-orang lokal dengan didasarkan pada model-model pengetahuan lokal.

Sebagaimana buku-buku sebelumnya, dalam *Seeing Like a State*, pada akhirnya Scott juga merayakan kedigdayaan pengetahuan lokal, yang kali ini disebut sebagai *metis*, sebuah konsep pengetahuan praktis milik kalangan masyarakat lokal yang berkembang di Yunani kuno. Ia secara lugas mengatakan bahwa praktik-praktik pertanian yang didasarkan atas pengetahuan lokal sesungguhnya jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan praktik-praktik pertanian modern yang didasarkan atas logika dan prinsip geometris-rasional. Pada bagian awal, secara intens dan bertubi-tubi Scott banyak membahas proyek-proyek rekayasa sosial negara, tetapi pada bagian penutup ia seperti melakukan *dropshot* mematikan dengan menampilkan praktik-praktik *metis*.

Membaca buku ini kita akan merasakan bagaimana Scott melakukan idealisasi terhadap praktik-praktik pengetahuan lokal di satu sisi dan memandang sinis terhadap proyek-proyek pembangunan negara di sisi lain, pilihan sikap yang justru dihindari oleh Li (2007) dalam *The Will to Improve*. Dalam pandangan saya, kedua buku tersebut menysasar pokok persoalan yang sama, yakni proyek-proyek pengembangan dan pembangunan yang dilakukan oleh negara, meski berakhir dengan tekanan yang tidak sama. Jika Scott tetap belum beranjak dari cara pandang lama hingga terus saja mengidealisasikan pengetahuan lokal, tidak demikian dengan Li (2014) yang justru menawarkan dilema-dilema baru bagi masyarakat lokal. Karena itu, di beberapa tempat muncul fenomena yang boleh jadi tidak pernah terbayangkan oleh Scott: kapitalisme dari bawah (*capitalism from below*).

Di sinilah, menurut saya, titik lemah *Seeing Like a State*. Analisis hitam-putih yang dipaparkan Scott cenderung memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru, terutama ketika berhadapan dengan berbagai fenomena kontemporer, misalnya apa yang dinamakan oleh Santasombat (2008) sebagai *flexible peasant*, apa yang saya sebut sebagai *gambling economy* (Santoso 2015) di kalangan petani, dan apa

yang dikatakan *precariat* oleh Standing (2011). Semua itu fenomena kontemporer yang membuat kita tidak lagi relevan memberi batasan-batasan ajek mengenai siapa masyarakat lokal, siapa masyarakat global, apa kepentingan lokal, dan apa kepentingan global. Sebagai contoh, pembentukan kelas *precariat* justru banyak dipicu oleh tingginya tingkat mobilitas global masyarakat di era kontemporer. Makin membaiknya infrastruktur dan demam teknologi komunikasi yang menjangkau hingga ke pelosok-pelosok menjadikan fenomena mobilitas global kini tidak hanya didominasi oleh kalangan masyarakat perkotaan sebagaimana dicatat oleh Standing (2011), tetapi juga dirayakan oleh kalangan masyarakat perdesaan.

Meski begitu, *Seeing Like a State* adalah buku yang sangat menarik dan, sebagaimana lazimnya Scott, selalu menawarkan kejutan-kejutan baru, terutama dalam hal ungkapan dan konseptualisasi. Setelah *Weapons of the Weak* (2000) yang menggunakan cara pandang dari bawah, kali ini Scott mencoba memandang dari atas. Seperti disinggung sebelumnya, hasilnya ternyata tidak berbeda. Jawaban bagi segenap persoalan yang ditimbulkan akibat proyek-proyek negara adalah *metis* alias pengetahuan lokal. Jadi, dalam pandangan saya, Scott tetaplah Scott, yang selalu melakukan idealisasi terhadap lokalitas dan menawarkan kepastian-kepastian, jawaban yang sebenarnya justru mengundang pertanyaan-pertanyaan baru, terutama di era kekinian ketika kepastian terasa sangat cair. “Awan terhimpun, awan membeli,” demikian Geertz (1998) menyebutnya.

**Daftar Pustaka**

- FISHER, M. 2009. *Capitalist Realism: Is There No Alternative?* Winchester (Inggris) dan Washington (Amerika Serikat): Zero Books.
- GEERTZ, C. 1998. *After the Fact: Dua Negeri, Empat Dasawarsa, Satu Antropolog*. Diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh LANDUNG SIMATUPANG. Yogyakarta: LKiS.
- GRAMSCI, A. 1971. *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. Disunting dan diterjemahkan dari bahasa Italia oleh QUINTIN HOARE dan GEOFFREY NOWELL SMITH. New York (Amerika Serikat): International Publishers.
- HOBBS, T. 1998. *Leviathan*. Oxford (Inggris): Oxford University Press.
- LI, T.M. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Duke University Press.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Durham (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Duke University Press.
- SANTASOMBAT, Y. 2008. *Flexible Peasants: Reconceptualizing the Third World's Rural Types*. Chiang Mai (Thailand): Regional Center for Social Sciences and Sustainable Development, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University.
- SANTOSO, H. 2015. "Bertani Itu Berjudi: Ketika Pasar Bias Spekulasi." Disertasi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- SCOTT, J.C. 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Yale University Press.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh A. RAHMAN ZAINUDDIN, SAJOGYO, dan MIEN JOEBHAAR. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- STANDING, G. 2011. *The Precariat: The New Dangerous Class*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Bloomsbury Academic.

